



## AKTIVITAS PEMBENTUK BIAYA LAYANAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19

Dani Sugiri<sup>1</sup>, Agung Arie Pratama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara, Indonesia

<sup>2</sup>Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kemenkeu RI, Indonesia

\* Corresponding Author. E-mail: [1danisugiri@pknstan.ac.id](mailto:danisugiri@pknstan.ac.id), [2agung.arie@kemenkeu.go.id](mailto:agung.arie@kemenkeu.go.id)

Receive: 10/09/2020

Accepted: 03/10/2020

Published: 04/10/2020

### Abstrak

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada perubahan metode pembelajaran dalam dunia pembelajaran di Indonesia dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh, tidak terkecuali di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Perubahan metode pembelajaran tersebut diikuti dengan perubahan kegiatan dalam pemberian layanan dan anggaran yang diperlukan untuk memberikan layanan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan penyesuaian kebijakan anggaran agar tetap dapat memberikan layanan pembelajaran selama pandemi Covid-19 pada lembaga pelatihan baik yang dikelola oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelaahan dokumen, regulasi yang berlaku, jurnal ilmiah serta artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan perubahan aktivitas dalam rangka pencapaian layanan dan satuan biaya yang diperlukan.

**Kata Kunci:** pembelajaran jarak jauh (PJJ), layanan pembelajaran, biaya PJJ.

### Abstract (English-Indonesia)

*The COVID-19 pandemic has had an impact on changing learning methods in the world of learning in Indonesia from face-to-face to distance learning, including the Financial Education and Training Agency. Changes in learning methods were followed by changes in activities in service delivery and the budgets needed to provide services. This study aims to explain budget policy adjustments so that they can provide learning services during the Covid-19 pandemic to training institutions managed by the government. The research method used is qualitative research by reviewing documents, applicable regulations, scientific journals and related articles. The results showed changes in activities in order to achieve the required service and unit costs.*

**Keywords:** distance learning (DL), learning services, DL costs.

### Pendahuluan

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan (Herliandry et al., 2020). Kebijakan baru terjadi pada dunia pendidikan dengan perubahan pembelajaran yang semula harus datang ke kelas atau gedung, menjadi cukup dilakukan rumah saja (Khasanah et al., 2020). Untuk mencegah pandemi Covid-19 menyebar

tidak terkendali, kegiatan pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan media daring (*online*). Pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam kelas ataupun jarak jauh apabila terdapat kendala untuk bertemu dalam suatu kelas dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan (Sari et al., 2020). Pemerintah mengeluarkan untuk meniadakan sementara waktu pembelajaran tatap muka secara

langsung dan diganti dengan pembelajaran secara *online*, baik pada tingkat sekolah dasar dan menengah, maupun tingkat perguruan tinggi (Pujilestari, 2020). Model pembelajaran dengan kelas virtual (*e-learning*) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan sebuah terobosan baru dibidang pengajaran dan pembelajaran, karena mampu meminimalkan perbedaan cara mengajar dan materi, sehingga memberikan standar kualitas pembelajaran yang lebih konsisten (Elyas, 2018).

Menurut Rumble (1997) dalam memahami *open and distance learning* kita akan mengenal tiga sub sistem (Gaba, 2004). Pertama, sub sistem pengaturan (*regulatory sub-system*), seperti sumber daya manusia, pengadaan, keuangan, peralatan dan bangunan. Kedua, sub sistem bahan ajar (*material sub-system*), seperti produksi dan distribusi materi pembelajaran. Ketiga, sistem pendukung (*support system*), seperti pendataan calon peserta, pengelolaan biaya, penjadwalan dan pengelolaan ujian.

Pembelajaran jarak jauh terbukti pada pendidikan Air Forces di Turki membutuhkan biaya yang lebih rendah dari pada pelaksanaan tahap muka (Atici & Atik, 2011). Pembelajaran tatap muka membutuhkan biaya tiga kali lebih banyak dibandingkan pembelajaran jarak jauh, sehingga dapat dikatakan lebih efektif (Atici & Atik, 2011).

Pembiayaan dalam pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh berbagai aktivitas yang terjadi dalam sistem PJJ (Gaba, 2004). Aktivitas tersebut dapat berupa pembuatan dan penyediaan modul/audio/video pembelajaran, dukungan administrasi dan akademik, penilaian dan evaluasi (Gaba, 2004).

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pemberian layanan pemerintah disusun menurut output atau keluaran (DJA, 2016). Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan (Kemenkeu, 2019).

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) merupakan unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas menyelenggarakan program pembelajaran di bidang keuangan negara. Untuk melayani

kebutuhan pembelajaran bidang keuangan negara bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat luas, termasuk pegawai pengelola keuangan negara di instansi pemerintah lain, BPPK selalu mengupayakan terobosan di bidang pembelajaran. BPPK telah meneguhkan diri menjadi *Coorporate University* bagi Kemenkeu melalui rintisan *Knowledge Management System* (Suharsono & Indaryani, 2020) dengan tagline "*Belajar Tanpa Batas*". Salah satu strategi yang telah ditempuh oleh BPPK adalah menginisiasi pembelajaran secara elektronik (*e-learning*) dan *blended learning* (Yuniarto et al., 2019), dengan tetap menjalankan pelatihan klasikal. Dengan adanya pandemic COVID-19, BPPK mencari strategi baru baru untuk tetap dapat menjalankan tugas dan fungsi seoptimal mungkin.

## Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian dilakukan dengan target atau sasaran berupa aktifitas pembentuk biaya layanan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan sebagai respon atas terjadinya pandemi COVID-19.

Aktifitas pembentuk biaya layanan pembelajaran jarak jauh diperoleh dengan pencarian melalui penelusuran jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, regulasi, dan artikel yang relevan atau informasi yang kredibel yang berhubungan dengan pembelajaran jarak jauh.

## Hasil dan Pembahasan

Sebelum terjadi pandemi COVID-19, BPPK menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam dua model. **Pertama** kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara klasikal yaitu peserta dan pengajar bertemu atau bertatap muka di kelas. Pembelajaran ini bersifat *synchronous*, dimana peserta bertemu dengan pengajar pada waktu yang ditentukan. Kedua, kegiatan pembelajaran secara elektronik (*e-learning*). *E-learning* dapat dilaksanakan dengan mengkombinasikan *synchronous* maupun *asynchronous*. *Synchronous* berarti peserta dan pengajar

bertemu pada waktu yang sama, sedangkan *asynchronous* berarti tidak pada waktu bersamaan (Hartanto, 2020). Dalam pelaksanaan *e-learning* terdapat ketentuan bahwa setiap pegawai hanya diperkenankan mengikuti *e-learning* selama 3 jam (LAN RI, 2018).

Setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19 terjadi, terdapat kondisi jika pembelajaran secara klasikal tidak mungkin dapat dilakukan. Pembelajaran yang bersifat pengumpulan orang, secara fisik dihindari. Dengan demikian, pelatihan klasikal baik menggunakan asrama maupun non asrama sulit dilaksanakan.

Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*) yang kemudian disingkat PJJ merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar tempat penyelenggaraan pelatihan yang menekankan pada pembelajaran mandiri yang dikelola secara sistematis dan tidak terbatas oleh jarak dan waktu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran (BPPK, 2020a).

Manfaat yang diperoleh dari penggunaan PJJ antara lain (a) adanya fleksibilitas, (b) independensi bagi peserta pembelajaran (*independent learning*), dan (c) penghematan biaya (Elyas, 2018). Manfaat serupa juga diperoleh apabila kita menggunakan *e-learning*.

Secara umum, tahapan penyelenggaraan PJJ di lingkungan menjadi 4 tahapan yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama dan 1 (satu) komponen pendukung seperti dijelaskan pada Tabel 1. Tahap perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi merupakan tahapan utama. Tahapan utama merupakan tahapan yang menjadi penentu ketercapaian target kegiatan.

Tabel 1. Tahapan Penyelenggaraan PJJ di Lingkungan BPPK

No.	Tahapan	Sifat
1.	Perencanaan PJJ	Utama
2.	Penyelenggaraan PJJ	Utama
3.	Evaluasi	Utama
4.	Penyediaan dukungan Administrasi dan Teknologi	Pendukung

Sumber: (BPPK, 2020a)

Perencanaan PJJ meliputi kegiatan analisis kebutuhan PJJ, desain program PJJ, dan pengembangan bahan ajar PJJ (BPPK, 2020a). Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendapatkan gambaran pembelajaran yang diperlukan calon peserta. Desain program pembelajaran diperlukan untuk menterjemahkan program pembentukan kompetensi yang paling sesuai bagi calon peserta.

Penyelenggaraan PJJ merupakan tahapan yang secara nyata dinikmati peserta sebagai layanan yang disediakan oleh BPPK. Penyelenggaraan PJJ dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) persiapan pelatihan (pengelolaan peserta dan pengajar, rapat persiapan, pengelolaan jadwal, penyiapan dokumen pendukung dan pengoordinasian kebutuhan penyelenggaraan pelatihan); (2) kegiatan pelatihan (pembukaan, membangun komitmen pembelajaran, pengelolaan kelas, penutupan); (3) purna pelatihan (fasilitasi forum alumni pelatihan).

Evaluasi PJJ terdiri dari evaluasi penyelenggaraan dan pengajar, evaluasi hasil peserta, serta evaluasi pascapembelajaran. Selain itu pada tahapan ini juga dilakukan pengolahan hasil (pengumuman hasil peserta, penerbitan sertifikat dan rekomendasi tindak lanjut) dan pelaporan kinerja PJJ.

Dukungan Administrasi dan teknologi meliputi dokumentasi bukti pelatihan (bukti kehadiran dan bukti pembelajaran) serta dukungan media pembelajaran melalui teknologi dari berbagai *platform*. BPPK memanfaatkan beberapa media seperti Kemenkeu Learning Centre (KLC), Zoom, Google Classroom, Webex, Whatsapp, dan sejenisnya). Pemanfaatan TI atau aplikasi pengelolaan pembelajaran sangat penting dilakukan, yaitu dengan mengintegrasikan (memasukan) bahan pembelajaran termasuk strategi penyampaiannya untuk setiap mata pelatihan (LAN RI, 2020).

Kegiatan penyelenggaraan PJJ dilaksanakan dalam bentuk sebuah pelatihan atau kegiatan pembelajaran. Dalam dokumen anggaran BPPK, kegiatan pembelajaran dialokasikan dalam sebuah output. Hal ini sejalan dengan konsepsi dalam anggaran berbasis kinerja bahwa output yang

dialokasikan dalam dokumen anggaran sebaiknya bersifat *on-going* (Kemenkeu, 2019). Pencapaian keluaran pembelajaran akan membutuhkan sejumlah kelompok aktivitas atau biasa dikenal komponen (Kemenkeu, 2019). Komponen yang diperlukan untuk pencapaian Output Layanan Pembelajaran terdiri atas komponen persiapan kelas, pelayanan kelas, dan penilaian kompetensi (BPPK, 2020b).

Tabel 2 Komponen Penyelenggaraan Pembelajaran Klasikal, *E-learning* dan PJJ

Komponen	Klasikal	E-learning	PJJ
Persiapan kelas (A)	✓	✓	✓
Pelayanan kelas (B)	✓	✓	✓
Penilaian kompetensi (C)	✓	✓	✓

Sumber: (BPPK, 2020b)

Kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan PJJ lebih murah dibandingkan dengan pembelajaran secara klasikal, namun lebih mahal dari pada *e-learning*. Tabel 3 menjelaskan perbandingan biaya per unit output peserta beberapa model penyelenggaraan pembelajaran di BPPK. Model penyelenggaraan pembelajaran yang diilustrasikan menggunakan asumsi durasi umum pelatihan yaitu lima (5) hari pelaksanaan. Model pembelajaran klasikal asrama membutuhkan biaya lebih besar dibandingkan model pembelajaran klasikal non asrama. Biaya akomodasi penginapan asrama membutuhkan tambahan biaya sebesar 73,05% dari biaya pembelajaran klasikal tanpa asrama. Penyelenggaraan PJJ dan *E-learning* jauh lebih efisien dibanding dengan klasikal tatap muka, baik klasikal dengan atau tanpa asrama.

Tabel 3 Biaya per Unit Output (Peserta)

No.	Jenis Pembelajaran	Rp
1.	Klasikal Asrama	1.717.343
2.	Klasikal Non Asrama	992.410
3.	<i>E-learning</i>	149.333
4.	Pembelajaran Jarak Jauh	343.500

Sumber: (Bagian Keuangan, 2020).

Walaupun setiap komponen dalam penyediaan layanan tidak terdapat perbedaan, namun terdapat perbedaan detail aktivitas. Perbedaan biaya antar model pembelajaran terjadi karena jika dilihat lebih detail, terdapat perbedaan struktur biaya pada setiap komponen dan atau frekuensi dari detail aktivitas. Tabel 4 pada lampiran menyajikan item pada detail aktivitas yang dapat menjadi sumber penyebab terjadi perbedaan biaya. Pada PJJ, karena dimasukkan sebagai pengganti pembelajaran secara klasikal, maka dapat diselenggarakan sampai dengan 8 jam per hari (BPPK, 2020a). Hal ini berbeda dengan *e-learning* yang diatur maksimal 3 jam per hari untuk setiap pegawai (LAN RI, 2018).

Berdasarkan data realisasi penyelenggaraan pelatihan/pembelajaran pada TA 2019, BPPK dapat mendapatkan output yang optimal dengan biaya yang relatif lebih efisien. Peserta kegiatan pembelajaran BPPK pada TA 2019 mencapai 182.123 peserta yang terdiri dari 37.585 orang secara klasikal (21%) dan 144.583 (79%) orang secara *e-learning*. Anggaran yang direalisasikan adalah sebesar Rp182,65 miliar dengan rincian Rp182,12 miliar (99,7%) untuk pembelajaran klasikal dan Rp0,53 (0,3%) miliar untuk pembelajaran *e-learning*. Hal ini menunjukkan bahwa *e-learning* sangat efisien, dengan biaya 0,3% dapat mendapatkan output 79%. Pada tahun 2019, sebagian besar pembelajaran *e-learning* BPPK dilaksanakan secara *asynchronous*.

Untuk melaksanakan PJJ, selain persiapan program dan tata kelola, juga diperlukan penyiapan infrastruktur. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk kepentingan produksi materi pembelajaran dan penyelenggaraan PJJ. Pada kantor Pusat BPPK diperlukan investasi senilai Rp0,22 miliar (Bagian Keuangan, 2020). Investasi tersebut diperlukan untuk pengadaan media pendukung *synchronous*, kamera, kabel data, monitor, PC master control, TV LED, PC/Laptop Co-host dan perangkat lain.

## Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa BPPK sebelum pandemi Covid-19, BPPK telah memiliki

platform pembelajaran dengan e-learning sebagai pelengkap pembelajaran secara klasikal. Pengembangan layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ) merupakan strategi agar proses pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 dapat terlaksana dengan seminimal mungkin. Kegiatan atau aktivitas dalam penyelenggaraan PJJ adalah perencanaan, penyelenggaraan PJJ, evaluasi, serta dukungan administrasi dan teknologi. Biaya *e-learning* dan biaya PJJ cenderung lebih murah dibandingkan pembelajaran secara klasikal. Perbedaan biaya antar *e-learning* dengan PJJ adalah terletak pada detail aktivitas komponen dan intensitas penggunaan item biaya.

#### Daftar Pustaka

- Atici, B., & Atik, I. (2011). Cost analysis in distance learning: Turkish air forces distance learning center case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 28, 640–645. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.121>
- Bagian Keuangan. (2020). *RKAKL TA 2020*. BPPK Kementerian Keuangan.
- BPPK. (2020a). *Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* (Nomor KEP-82/PP/2020). BPPK Kementerian Keuangan.
- BPPK. (2020b). *Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020*.
- DJA. (2016). *Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran*. DJA Kemenkeu.
- Elyas, A. H. (2018). Penggunaan Model Pembelajaran E-Learning Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Warta*, 56(04), 1–11.
- Gaba, A. K. (2004). *STRIDE HANDBOOK 11 COST ANALYSIS IN OPEN AND DISTANCE LEARNING Staff Training and Research Institute of Distance Education COST ANALYSIS OF OPEN AND DISTANCE*. 068(February).
- Hartanto, W. (2020). *Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran*. 3.
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E., & Heru, K. (2020). Transformasi Media Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jtp.v22i1.15286>
- Kemenkeu. (2019). *PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran*.
- Khasanah, D. R. A. U., Pramudibyanto, H., & Widuroyekti, B. (2020). Pendidikan Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Sinestesia*, 10(1), 41–48. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/44>
- LAN RI. (2018). *Peraturan LAN RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning*.
- LAN RI. (2020). *Surat Edaran No. 10/K.1.HKM.02.3/2020* (Vol. 2). LAN RI.
- Pujilestari, Y. (2020). Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1), 49–56. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15394/7199>
- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid 19. *Jurnal MAPPESONA*, 1, 12.
- Suharsono, A., & Indaryani, A. S. (2020). IMPLEMENTASI KNOWLEDGE MANAGEMENT DALAM KEMENKEU CORPORATE UNIVERSITY. *Abdi Laksana*, 1(1).
- Yuniarto, A., Hubeis, A. V., & Sukmawati, A. (2019). *FAKTOR-FAKTOR KUNCI KESUKSESAN IMPLEMENTASI CORPORATE UNIVERSITY KEY SUCCESS FACTORS IMPLEMENTING CORPORATE UNIVERSITY*

*IN FINANCIAL EDUCATION AND TRAINING  
AGENCY TRANSFORMATION PROCESS.*  
5(3), 466–477.

#### **Profil Penulis**

**Dani Sugiri.** Penulis lahir di Kebumen pada tanggal 20 Mei 1982. Pendidikan tinggi penulis antara lain (a) Program Diploma IV Akuntansi Pemerintahan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus pada tahun 2010; (b) Program Strata Satu Akuntansi pada Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) lulus pada tahun 2008; dan (c) Program Magister Akuntansi Pemerintahan pada Universitas Indonesia lulus pada tahun 2017. Penulis merupakan pegawai pada Kementerian Keuangan sebagai dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN.

Penulis juga merupakan Ketua Divisi sekaligus anggota pada Pusat Studi Keuangan, Ekonomi Daerah dan Desa (PUSKEDDA).

**Agung Arie Pratama.** Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 26 Desember 1988. Pendidikan tinggi penulis antara lain (a) Program Diploma III Penilai/PBB Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus pada tahun 2010; (b) Program Strata Satu Manajemen Ekonomi Publik pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN lulus pada tahun 2013. Penulis merupakan pegawai pada Kementerian Keuangan sebagai Pemroses Bahan Penyusunan Anggaran Senior di Bagian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan